

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan 17.504 pulau, menyimpan potensi ekonomi maritim yang sangat besar. Dari jumlah tersebut, 8.651 pulau telah memiliki nama resmi, sementara 8.853 pulau lainnya belum diberi nama (Alfath *et al.*, 2020). Keberagaman geografis ini mencerminkan besarnya peluang pengembangan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional serta peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir.

Potensi sumber daya perikanan Indonesia mencakup perikanan tangkap dan budidaya, dengan estimasi potensi tangkap lestari maksimum (Maximum Sustainable Yield (MSY) sebesar 12,65 juta ton per tahun. Namun, realisasi produksi perikanan tangkap pada tahun 2023 tercatat hanya mencapai 7,2 juta ton (BPS, 2023). Hal ini menandakan adanya ruang optimalisasi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Sebagai salah satu subsektor strategis, perikanan berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan, menyerap tenaga kerja, dan memberikan kontribusi terhadap devisa negara melalui ekspor hasil laut (Rustia, 2011).

Peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi salah satu indikator utama dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, keluarga dengan kesejahteraan yang lebih baik cenderung memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber daya produktif, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang pada gilirannya

kan kondisi yang mendukung keberlanjutan penghidupan mereka. Demikian, kehidupan masyarakat nelayan memiliki karakteristik tersendiri



yang dibentuk oleh dinamika aktivitas di laut yang sarat risiko dan ketidakpastian, serta tidak banyak dijumpai pada kelompok profesi lainnya (Sriyono *et al.*, 2021).

Komunitas pesisir dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya ini menjadi tumpuan bagi mata pencaharian masyarakat setempat, tidak hanya dalam sektor perikanan, tetapi juga sektor-sektor ekonomi lainnya. Dengan kekayaan alam yang melimpah tersebut, secara teoritis masyarakat pesisir seharusnya dapat mencapai kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Namun kenyataannya, sebagian besar nelayan Indonesia masih hidup dalam kondisi yang jauh dari sejahtera. Ketimpangan ini tercermin dari rendahnya pendapatan, terbatasnya akses terhadap layanan dasar seperti pangan, kesehatan, pendidikan, hingga tempat tinggal yang layak.

Wilayah pesisir bahkan menjadi salah satu kantong kemiskinan terbesar di Indonesia. Sebanyak 25,89 juta penduduk miskin tinggal di desa-desa pesisir berdasarkan data Badan Pusat Statistik, yang mewakili 45 persen dari total penduduk miskin nasional. Temuan ini diperkuat oleh Nugraheni (2023) yang melaporkan bahwa pada tahun 2022, wilayah pesisir menyumbang sekitar 68% dari angka kemiskinan nasional, dengan mayoritas berasal dari komunitas nelayan di daerah terpencil dan pedesaan.

Secara teoritis, peningkatan produksi perikanan semestinya dapat memperbaiki taraf hidup nelayan. Pemerintah mengandalkan indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebagai ukuran kesejahteraan mereka. Akan tetapi, fluktuasi NTN dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa peningkatan produksi belum tentu berdampak langsung terhadap penguatan daya beli (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020).



spektif teori pembangunan ekonomi klasik, penguatan produksi diyakini mendorong peningkatan kesejahteraan karena pertumbuhan output sejalan dengan kenaikan pendapatan masyarakat. Namun, literatur

pembangunan modern mengingatkan bahwa pertumbuhan produksi tidak secara otomatis meningkatkan kesejahteraan apabila distribusi hasil pembangunan tidak merata (Todaro & Smith, 2015). Konteks perikanan tangkap di Indonesia memperlihatkan adanya kesenjangan antara prediksi teori pembangunan dan realitas empiris, di mana peningkatan produksi belum berbanding lurus dengan perbaikan kesejahteraan nelayan. Temuan ini menegaskan bahwa pertumbuhan output tidak secara otomatis meningkatkan kondisi ekonomi nelayan, sehingga keberhasilan pembangunan sektor perikanan perlu dilihat tidak hanya dari besaran produksi, tetapi juga dari distribusi manfaat dan akses nelayan terhadap hasil usahanya.

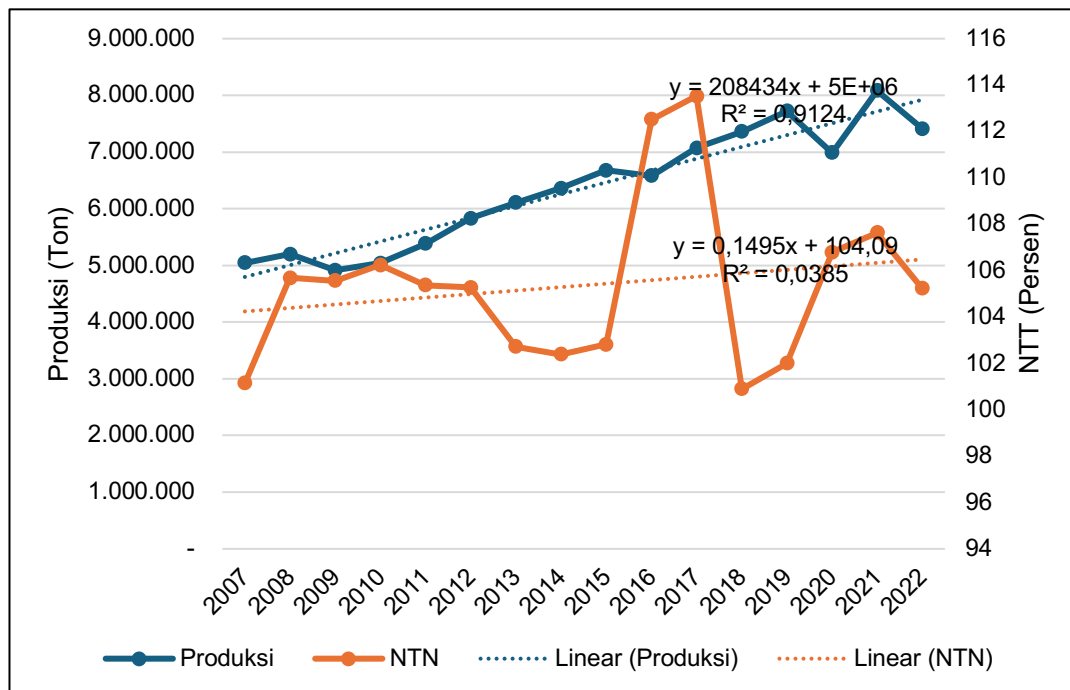
Temuan lapangan yang diperoleh melalui wawancara awal dengan masyarakat nelayan di wilayah Bajoe, Kabupaten Bone, dan kawasan pesisir Pantai Majene menunjukkan adanya ketidakefektifan kebijakan pada tingkat implementasi. Meskipun kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara normatif dipandang tepat dan dibutuhkan oleh nelayan, dalam praktiknya akses terhadap BBM bersubsidi tidak selalu berjalan sesuai ketentuan dan pemanfaatan KUR belum sepenuhnya diarahkan pada kegiatan produktif usaha perikanan. Kondisi ini sejalan dengan temuan data kuantitatif berbasis per kapita yang menunjukkan bahwa besaran KUR dan subsidi BBM per tenaga kerja nelayan tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan antarpovinsi, terutama pada wilayah dengan jumlah tenaga kerja perikanan yang besar. Akibatnya, kebijakan yang dialokasikan belum efektif menurunkan biaya produksi maupun meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Secara teoritis, konsep *welfare state* yang dikembangkan oleh Jeremy (1748–1832) menyatakan bahwa negara bertanggung jawab menjamin aan terbesar bagi sebanyak mungkin warga negara. Dalam prinsip isme tersebut, kebijakan publik yang mendorong peningkatan



kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama (Quadagno, 1994). Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Keynesian, yang menekankan pentingnya pengeluaran negara di sektor sosial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas kesejahteraan. (Bentham, J (1789/2007)

Pembangunan kesejahteraan yang efektif pada dasarnya harus melibatkan peran aktif masyarakat itu sendiri, sementara pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dan dinamisator. Dalam konteks ini, sektor swasta, yang lebih fleksibel dan inovatif, memiliki kekuatan yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan pemerintah. Pemerintah, meskipun berperan penting dalam penyediaan kebijakan dan infrastruktur, cenderung terbatas oleh birokrasi dan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dan penguatan sektor swasta menjadi kunci dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan.



BPS dan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Gambar 1. 1 Perkembangan Produksi Nelayan Perikanan

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap di Indonesia memiliki perkembangan selama periode 2007–2022, produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan yang relatif konsisten berdasarkan hasil estimasi garis regresi dengan nilai R^2 yang relatif tinggi. Sementara itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) menunjukkan variasi antarperiode yang cukup besar dengan nilai R^2 yang relatif rendah. Perbedaan pola ini mengindikasikan bahwa peningkatan produksi tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan nelayan. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara capaian produksi sektor perikanan dan perbaikan daya beli nelayan, sehingga peningkatan output perlu diiringi dengan kebijakan yang lebih efektif dalam mentransmisikan manfaat produksi ke tingkat kesejahteraan. Hal ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan dan pengembangan kelompok pelaku usaha perikanan tangkap. Proporsi kelompok pelaku usaha masih didominasi oleh kelompok pemula hingga 12% (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Lakip, 2020).

Pembangunan sektor perikanan di Indonesia selama beberapa dekade terakhir didominasi oleh pendekatan yang berorientasi pada peningkatan produksi. Subsidi BBM, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan berbagai program pemerintah lainnya ditujukan untuk meningkatkan kapasitas produksi perikanan, yang secara normatif diasumsikan mampu mendorong perbaikan kesejahteraan nelayan. Namun demikian, bukti empiris mengenai hubungan kausal antara produksi dan kesejahteraan nelayan masih terbatas dan sering kali tidak mempertimbangkan heterogenitas regional serta potensi endogenitas produksi.

Kebijakan anggaran pro-poor didefinisikan sebagai alokasi finansial yang secara langsung memberikan manfaat bagi masyarakat miskin, memfasilitasi, mendorong partisipasi, serta memberdayakan kontrol mereka dalam perencanaan dan penganggaran, baik di tingkat nasional maupun daerah (Nursini 2018). Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan,



pemerintah telah mengembangkan kebijakan berupa penyaluran KUR, yang dirancang berdasarkan permasalahan yang dihadapi nelayan, sambil mempertimbangkan faktor internal yang dinamis serta lingkungan eksternal.

Nelayan seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses modal usaha karena dianggap berisiko tinggi oleh lembaga keuangan. Dengan adanya KUR, nelayan dapat memperoleh pinjaman dengan bunga rendah, yang memungkinkan mereka membeli peralatan, bahan bakar, atau memperbaiki kapal (Willie, *et al.*, 2017). Modal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Dukungan modal dari kredit, nelayan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka, baik melalui teknologi atau sarana tangkap yang lebih efisien (Le, 2012).

Program kredit dari pemerintah berperan penting dalam membantu nelayan keluar dari lingkungan utang dengan menyediakan pinjaman pada suku bunga yang jauh lebih terjangkau, sehingga meningkatkan kesejahteraan finansial mereka (Asiedu *et al.*, 2012). KUR berfungsi sebagai instrumen penting untuk memperbaiki taraf hidup nelayan melalui perluasan akses permodalan, pengurangan ketergantungan pada rentenir, serta peningkatan pendapatan yang didorong oleh produktivitas yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Alvarez, *et al.*, 2021) and (de la Torre 2023) menunjukkan bahwa dengan pemberian Kredit Program Nelayan (FONDEPES) dari Pemerintah Peru memberikan peningkatan yang signifikan terhadap kesejahteraan Nelayan. Hasil yang serupa ditemukan Anggaraeni, Maryunani, Budi, dan Wildan (2020) yang menyatakan bahwa kredit tidak hanya diakses oleh nelayan tradisional tetapi juga diakses oleh nelayan modern dengan menggunakan teknologi penangkapan ikan.



ain KUR, variabel lain yang mendorong peningkatan kesejahteraan adalah Bahan BBM . Semakin tinggi biaya BBM mengurangi keuntungan Bagi nelayan tangkap, BBM merupakan salah satu komponen biaya

terbesar dalam operasi penangkapan ikan, terutama bagi mereka yang menggunakan kapal bermotor. Untuk menekan biaya BBM, Pemerintah memberikan subsidi energi BBM dengan tujuan untuk memfasilitasi masyarakat nelayan dalam mengakses layanan dan utilitas dasar, serta untuk mengurangi dampak fluktuasi harga. Subsidi ini membuat harga BBM yang digunakan nelayan lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar (Vandeninden *et al.*, 2022).

Harga BBM yang terjangkau memungkinkan nelayan untuk menjangkau wilayah tangkapan yang lebih luas (Shittu *et al.*, 2024). Dengan kemampuan menjelajah lebih jauh, nelayan dapat memperoleh hasil tangkapan yang lebih banyak dan beragam, meningkatkan potensi pendapatan mereka (Nwachukwu & Chike, 2011).

Pengurangan biaya operasional akibat Subsidi BBM memberikan dukungan signifikan bagi nelayan dalam menjaga harga jual ikan agar tetap kompetitif. Hal ini terjadi karena nelayan tidak perlu membebankan biaya BBM yang tinggi kepada konsumen (Vandeninden, 2022). Dengan harga yang lebih stabil, permintaan terhadap ikan tetap terjaga, memungkinkan nelayan untuk memperoleh pasar yang lebih konsisten dan pada akhirnya membantu menjaga pendapatan mereka tetap stabil (Abimanyu & Imansyah, 2023; Rentschler & Bazilian, 2017).

Sejalan dengan (Husain *et al.*, 2020) bahwa subsidi bahan bakar masih sangat diperlukan oleh nelayan skala kecil di Malaysia dan didukung oleh studi sebelumnya Salleh (2014) bahwa subsidi BBM harus dilanjutkan, karena dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan dari hasil tangkapan dalam aktivitas perikanan mereka. Hafidzatul *et al.*, 2020) menemukan bahwa Subsidi bahan bakar dapat mengurangi biaya aktivitas

apan ikan dan meningkatkan pendapatan nelayan skala kecil di Kedah s, meskipun terdapat potensi risiko penangkapan ikan berlebihan.



Namun terdapat penelitian yang bertentangan dengan studi sebelumnya bahwa subsidi tidak selalu berdampak pada kesejahteraan nelayan seperti dalam penelitian (Chai *et al.* 2021) menemukan bahwa Subsidi perikanan Tiongkok berkorelasi negatif dengan aktivitas penangkapan ikan. (Song *et al.*, 2024) menemukan bahwa penerapan subsidi pemerintah dapat meningkatkan pengelolaan polusi mikroplastik dalam budidaya laut dengan mendorong produksi dan pembelian alat tangkap yang ramah lingkungan, namun peningkatan subsidi tidak selalu menghasilkan hasil yang lebih baik

Selain itu, DAK juga berpengaruh terhadap kesejahteraan nelayan. DAK yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, memiliki hubungan signifikan dengan peningkatan kesejahteraan. Dana ini dialokasikan untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi prioritas nasional, termasuk sektor perikanan. (Syukri & Hinaya, 2019).

DAK dapat dimanfaatkan untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur perikanan sehingga mempermudah nelayan dalam memasarkan hasil tangkapannya secara lebih efisien, mengurangi pemborosan ikan, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil tangkapan yang dapat dipasarkan. Hal ini pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan nelayan (Lestari *et al.*, 2023). Selain itu, DAK juga digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perikanan dan pengembangan kualitas nelayan melalui pelatihan yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan (Qwanthala *et al.*, 2022; Holik, 2020).

Variabel lain yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan adalah tenaga kerja nelayan. Tenaga kerja memiliki peran yang sangat dalam meningkatkan kesejahteraan, baik untuk nelayan itu sendiri, mereka, maupun masyarakat sekitar. Dengan adanya tenaga kerja yang dan berpengalaman, produktivitas nelayan akan meningkat, sehingga



hasil tangkapan menjadi lebih besar dan berkualitas (Chiappori, 1992). Peningkatan produktivitas ini berdampak langsung pada peningkatan pendapatan nelayan (Benjaafar *et al.*, 2021) dan (Chan and Moffitt, 2018).

Penelitian oleh Stafford (2011) menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja nelayan Lobster di Florida berhubungan positif dengan peningkatan pendapatan berdasarkan jam kerja. Namun, temuan berbeda (Benjaafar *et al.*, 2021) menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang besar tidak selalu diikuti oleh peningkatan upah atau kesejahteraan, karena produktivitas marginal tenaga kerja nelayan cenderung rendah.

Penelitian terdahulu umumnya mengkaji pengaruh langsung KUR, DAK, subsidi BBM, dan tenaga kerja terhadap kesejahteraan nelayan, sementara kajian yang menempatkan produksi perikanan sebagai jalur mediasi menuju kesejahteraan masih terbatas. (Huntingford and Adams) meneliti perilaku nelayan salmon serta implikasinya terhadap produksi dan kesejahteraan, namun belum memasukkan peran variabel ekonomi dan kebijakan pemerintah. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menekankan kebaruan pada analisis pengaruh kebijakan dan faktor ekonomi terhadap kesejahteraan nelayan melalui peningkatan produksi perikanan.

Dengan kuantitas produksi yang lebih besar, pendapatan nelayan juga meningkat, terutama jika hasil tangkapan berkualitas tinggi memiliki nilai jual yang baik (Downing *et al.*, 1990). Produksi ikan yang tinggi dan berkelanjutan menciptakan stabilitas ekonomi bagi nelayan. Dengan hasil yang konsisten, mereka dapat menjaga kestabilan pendapatan dari waktu ke waktu (Martins *et al.*, 2012 and Lein 2018). Yaskun (2017) menemukan bahwa peningkatan hasil



perikanan memiliki hubungan positif dengan Nilai Tukar Nelayan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, sektor perikanan tangkap di Indonesia sangat penting bagi perekonomian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

nelayan, namun, banyak nelayan yang masih hidup dalam kondisi miskin. Kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan belum sepenuhnya efektif. Meskipun akses terhadap KUR, subsidi BBM, dan DAK dianggap penting untuk mendorong produksi perikanan, hal ini belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan secara signifikan. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian produksi dan perbaikan kesejahteraan yang sesungguhnya.

Pendekatan evaluatif yang tidak hanya berorientasi pada input output, melainkan berfokus pada outcome yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan nelayan perikanan tangkap. Disertasi ini membangun kerangka pemikiran berbasis sintesis teori kesejahteraan klasik (Bentham, J (1789/2007) dan pendekatan kapabilitas (Sen. A,1999), yang diformulasikan dalam model kausal struktural menggunakan pendekatan ekonometrika Two-Stage Least Squares untuk mengakomodasi endogenitas

Ketimpangan antara peningkatan produksi perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan mencerminkan persoalan struktural yang belum teratasi. Intervensi fiskal seperti KUR, subsidi BBM, dan DAK belum menunjukkan dampak optimal terhadap peningkatan taraf hidup nelayan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang diterapkan dan hasil yang diharapkan. Untuk menjawab kesenjangan tersebut, disertasi ini mengembangkan sintesis antara pendekatan klasik dan pendekatan produktivitas berbasis input kebijakan sebagai dasar konseptual membangun model kausal struktural, yang difokuskan pada subsektor perikanan tangkap, sehingga mampu menunjukkan mekanisme bagaimana kebijakan fiskal berdampak terhadap kesejahteraan nelayan. Oleh



U, penelitian ini menjadi penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih
 r berbasis pada produktivitas nelayan sebagai landasan peningkatan
 raan.

Kontribusi utama penelitian ini adalah penggunaan kerangka data panel dengan kontrol heterogenitas provinsi serta pendekatan instrumental variabel untuk menguji secara eksplisit potensi endogenitas produksi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar empiris yang kuat bagi perumusan kebijakan perikanan yang lebih berorientasi pada kesejahteraan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah KUR pada sektor perikanan tangkap berpengaruh terhadap kesejahteraan nelayan perikanan tangkap, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui produksi perikanan tangkap di Indonesia?
2. Apakah subsidi BBM pada sektor perikanan tangkap berpengaruh terhadap kesejahteraan nelayan perikanan tangkap, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui produksi perikanan tangkap di Indonesia?
3. Apakah DAK pada sektor perikanan tangkap berpengaruh terhadap kesejahteraan nelayan perikanan tangkap, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui produksi perikanan tangkap di Indonesia?
4. Apakah Tenaga Kerja pada sektor perikanan tangkap berpengaruh terhadap kesejahteraan nelayan perikanan tangkap baik secara langsung maupun tidak langsung melalui produksi perikanan tangkap di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Merancang dan mengestimasi model persamaan simultan untuk mengevaluasi pengaruh langsung dan tidak langsung kebijakan fiskal (KUR, subsidi BBM, dan DAK) serta tenaga kerja terhadap kesejahteraan nelayan melalui produksi perikanan.



nguji secara empiris validitas pendekatan berbasis produksi dalam menjelaskan hubungan kausal antara kebijakan fiskal dan kesejahteraan

nelayan pada subsektor perikanan tangkap, dengan kesejahteraan nelayan diprosikan oleh Nilai Tukar Nelayan (NTN).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memperkaya literatur akademik terutama pada penguatan teori kesejahteraan dan produksi.
2. Menjadi dasar pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti yang pro kepada nelayan perikanan tangkap.
3. Memberikan informasi berbasis bukti kepada penyuluh perikanan dan kelautan di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan pihak-pihak terkait di sektor perikanan Indonesia seperti Komite Nelayan Tradisional Indonesia, pemerhati masyarakat Nelayan, Lembaga Bantuan Masyarakat Nelayan dalam merumuskan rencana aksi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.
4. Pengembangan model mediasi berbasis SEM dalam konteks maritim Indonesia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 *Welfare Theory*

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) berakar kuat pada prinsip utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Dalam perspektif ini, fungsi utama pemerintah adalah memastikan "kebahagiaan terbesar bagi jumlah warga terbanyak" *the greatest happiness of the greatest number*. Bentham memperkenalkan istilah utilitas sebagai alat untuk mengukur dan mengartikulasikan kesejahteraan sosial secara kuantitatif. Validitas kebijakan publik dievaluasi berdasarkan besarnya manfaat sosial yang dihasilkan serta jangkauan penerima manfaatnya, khususnya pada mayoritas populasi. (Bentham, J (1789/2007),

Oleh karena itu, negara harus merancang sistem yang dapat mengoptimalkan total kesejahteraan kolektif termasuk alokasi sumber daya dan intervensi pemerintah yang strategis. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kondisi di mana manfaat kolektif yang diterima masyarakat luas secara signifikan melebihi potensi dampak negatif yang mungkin dialami oleh sebagian kecil individu. Gagasan normatif ini diperkuat oleh para ahli (Rosen, 2003) yang menegaskan bahwa kebijakan publik dapat dianggap tepat apabila mampu mengakumulasi manfaat sosial secara luas, menjadikannya fondasi normatif dalam implementasi negara kesejahteraan.

Pemikiran tersebut kemudian diperkaya oleh Hans-Werner Sinn (1994)



menambahkan pendekatan pragmatis terhadap pandangan moralistik. Ia menekankan bahwa keberhasilan negara kesejahteraan tidak hanya bergantung pada niat baik normatif, tetapi juga pada efektivitas teknokratis dalam

pengelolaan kebijakan. Kebijakan negara harus dirancang sedemikian rupa sehingga manfaat agregatnya secara jelas melebihi potensi kerugiannya, sehingga kesejahteraan kolektif dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan (Sinn, 1994).

Meskipun peran negara diposisikan secara sentral, pendekatan terhadap kesejahteraan dalam perspektif kontemporer tidak selalu mengandalkan dominasi negara. (Barr *et al.*, 2005) mengemukakan bahwa kesejahteraan dapat bersumber dari tiga hal utama, yakni: (1) pasar tenaga kerja, dalam bentuk upah dan kesempatan kerja yang didefinisikan secara luas; (2) penyediaan kesejahteraan dari sektor swasta melalui asuransi sukarela dan tabungan individu; serta (3) mekanisme kesejahteraan berbasis komunitas atau keluarga, yang bekerja melalui jaringan sosial dan solidaritas sukarela. Perspektif ini menekankan pentingnya sinergi antara negara, pasar, dan masyarakat dalam membangun sistem kesejahteraan yang adaptif dan inklusif.

Dalam pengembangan teori ekonomi kesejahteraan, Arthur Cecil Pigou memperkenalkan konsep eksternalitas sebagai elemen kunci. Eksternalitas merujuk pada dampak dari aktivitas ekonomi terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam transaksi. Pigou menekankan bahwa eksternalitas negatif seperti pencemaran lingkungan dapat dikoreksi melalui pengenaan pajak (*Pigovian taxes*), sedangkan eksternalitas positif seperti peningkatan kesejahteraan akibat subsidi produktif dapat didorong melalui kebijakan subsidi. Kontribusi Pigou memberikan justifikasi teoritis yang kuat bagi intervensi negara dalam mengoreksi kegagalan pasar demi tercapainya kesejahteraan sosial yang lebih merata. (Pigou, 1954)



owits dan Quadagno mengemukakan bahwa pengeluaran fiskal untuk
raan dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi, meskipun perdebatan
di kalangan ekonom mengenai risiko penurunan profitabilitas sektor

swasta. Meski demikian, aliran Keynesian tetap relevan dalam menjelaskan bagaimana peran belanja negara dapat memitigasi guncangan ekonomi dan memperkuat kohesi sosial.(Janowitz, 1977; Quadagno, 1997)

Mankiw secara lebih teknis menjelaskan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa menciptakan efek pengganda terhadap pendapatan nasional. Belanja negara mendorong produksi, meningkatkan pendapatan, dan selanjutnya mendorong konsumsi masyarakat. Siklus ini menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan menumbuhkan kesejahteraan ekonomi secara luas (Mankiw, 2006).

Samuelson dan Nordhaus dalam pembahasan mereka tentang kontrol pemerintah terhadap perekonomian dikatakan terdapat tiga instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian yaitu [1] perpajakan (taxes) [2] belanja pemerintah, [3] Regulasi/peraturan atau pengendalian. Dari sisi belanja pemerintah mendorong perusahaan atau individu untuk memproduksi barang atau jasa, seperti pemberian tunjangan dan penyediaan bantuan pendapatan. Mereka juga mengemukakan ada empat fungsi ekonomi pemerintah diantaranya membentuk berbagai program untuk mengubah distribusi pendapatan, program tersebut dibiayai melalui program transfer dalam bentuk subsidi atau tunjangan (Samuelson & Nordhaus, 2009)

Pendekatan ini secara konsisten menggarisbawahi hubungan antara kesejahteraan, pendapatan, dan produksi sebagai fondasi bagi intervensi publik. Pemerintah, melalui belanja sosial dan kebijakan fiskal lainnya, tidak hanya bertugas menyediakan bantuan langsung, tetapi juga menciptakan struktur ekonomi yang memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan secara berkelanjutan. Artinya, peningkatan kesejahteraan bukan sil akhir, tetapi proses yang dipengaruhi oleh interaksi kebijakan, alokasi laya, dan dinamika pasar.



Dalam kerangka tersebut, peran pasar menempati posisi yang krusial sebagai mekanisme awal pembentukan kesejahteraan. Pasar, khususnya pasar tenaga kerja dan pasar barang, menjadi ruang utama bagi individu untuk menukarkan tenaga, keterampilan, dan modal yang dimilikinya dengan pendapatan. Melalui mekanisme harga, pasar berfungsi sebagai alat koordinasi yang mengalokasikan sumber daya secara efisien dan mendorong peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, dalam perspektif kesejahteraan, pasar dipahami sebagai fondasi awal yang memungkinkan individu memenuhi kebutuhan dasarnya melalui aktivitas ekonomi yang produktif. Namun demikian, kemampuan pasar dalam menciptakan kesejahteraan tidak bersifat universal dan merata, karena efektivitasnya sangat bergantung pada struktur pasar, akses terhadap faktor produksi, serta posisi tawar pelaku ekonomi di dalamnya.

Dalam banyak konteks, terutama pada sektor-sektor berbasis sumber daya alam seperti perikanan tangkap, mekanisme pasar sering kali menghasilkan distribusi manfaat yang timpang. Nelayan kecil, meskipun berperan sebagai produsen utama, kerap berada pada posisi lemah dalam rantai nilai karena keterbatasan modal, teknologi, dan akses pasar. Kondisi ini menyebabkan pendapatan yang diterima tidak sebanding dengan risiko dan intensitas kerja yang dikeluarkan. Situasi tersebut menegaskan bahwa pasar, jika dibiarkan bekerja secara murni tanpa intervensi, berpotensi menghasilkan kesejahteraan yang bersifat parsial dan eksklusif, alih-alih kesejahteraan kolektif sebagaimana ditekankan dalam prinsip utilitarianisme Bentham.

Ketidaksempurnaan pasar ini memperkuat argumen bahwa kesejahteraan tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Kegagalan pasar,



misalnya, bentuk asimetri informasi, eksternalitas, maupun monopsoni, menjadi hambatan utama tercapainya kesejahteraan sosial yang optimal. Dalam sektor perikanan, misalnya, fluktuasi harga ikan, ketergantungan pada tengkulak, serta

volatilitas biaya operasional seperti bahan bakar, menciptakan ketidakpastian pendapatan yang tinggi. Akibatnya, pasar tidak mampu memberikan jaminan kesejahteraan yang stabil bagi nelayan, meskipun aktivitas produksi tetap berlangsung.

Dalam konteks inilah intervensi negara memperoleh justifikasi normatif dan ekonomis. Negara tidak dimaksudkan untuk menggantikan fungsi pasar, melainkan untuk melengkapinya melalui kebijakan yang mampu mengoreksi distorsi dan memperluas akses terhadap sumber daya produktif. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Rosen yang menempatkan kebijakan publik sebagai instrumen untuk mengakumulasi manfaat sosial secara luas. Negara bertindak untuk memastikan bahwa hasil dari aktivitas ekonomi tidak hanya terpusat pada segelintir pelaku pasar, tetapi terdistribusi secara lebih adil kepada kelompok masyarakat yang rentan.

Intervensi fiskal, khususnya melalui belanja pemerintah, subsidi, dan program pembiayaan, menjadi salah satu instrumen utama dalam menjembatani kesenjangan antara potensi pasar dan realitas kesejahteraan. Belanja sosial tidak semata dipahami sebagai pengeluaran konsumtif, tetapi sebagai investasi jangka panjang dalam peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Dengan menyediakan subsidi input, akses kredit, serta infrastruktur pendukung produksi, negara menciptakan kondisi yang memungkinkan pelaku usaha kecil meningkatkan produktivitas dan daya saingnya di pasar. Dalam perspektif ini, belanja negara berfungsi sebagai katalis yang memperkuat fungsi pasar, bukan sebagai pengganti mekanisme pasar itu sendiri.

Namun demikian, efektivitas intervensi negara sangat bergantung pada kebijakan dan kapasitas implementasinya. Sejalan dengan pandangan Werner Sinn, keberhasilan negara kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan normatif, tetapi juga oleh efisiensi teknokratis. Kebijakan yang



dirancang tanpa mempertimbangkan insentif ekonomi dan respons pelaku pasar berisiko menimbulkan inefisiensi, pemborosan anggaran, serta ketergantungan jangka panjang. Oleh karena itu, intervensi negara harus diarahkan pada penciptaan insentif yang mendorong perilaku produktif, bukan sekadar distribusi bantuan yang bersifat sementara. (Sinn, 1994)

Sinergi antara negara dan pasar menjadi kunci dalam membangun sistem kesejahteraan yang berkelanjutan. Negara menyediakan kerangka regulasi, perlindungan sosial, dan intervensi korektif, sementara pasar tetap berperan sebagai mesin utama penciptaan nilai tambah dan pendapatan. Dalam kerangka ini, kesejahteraan dipahami sebagai hasil interaksi dinamis antara kebijakan publik dan aktivitas ekonomi, bukan sebagai outcome statis dari salah satu mekanisme saja. Pendekatan ini memungkinkan kesejahteraan tumbuh seiring dengan peningkatan kapasitas produksi dan partisipasi ekonomi masyarakat.

Selain negara dan pasar, peran masyarakat dan komunitas lokal turut memperkaya ekosistem kesejahteraan. Jaringan sosial, kelembagaan lokal, dan solidaritas komunitas berfungsi sebagai penyangga ketika mekanisme pasar dan intervensi negara belum sepenuhnya efektif. Dalam sektor perikanan, misalnya, koperasi nelayan, kelompok usaha bersama, dan jaringan komunitas berperan dalam memperkuat posisi tawar nelayan serta memfasilitasi akses terhadap informasi dan sumber daya. Mekanisme ini melengkapi peran negara dan pasar dalam menciptakan kesejahteraan yang lebih inklusif.

Dalam perspektif ekonomi kesejahteraan, interaksi ketiga pilar—negara, pasar, dan masyarakat menjadi fondasi utama pembangunan kesejahteraan yang adaptif. Ketergantungan berlebihan pada salah satu pilar berpotensi menimbulkan dan ketidakseimbangan. Pasar tanpa regulasi dapat menghasilkan gan, negara tanpa efisiensi dapat menimbulkan inefisiensi, sementara cat tanpa dukungan institusional menghadapi keterbatasan kapasitas.



Oleh karena itu, keseimbangan peran ketiganya menjadi prasyarat bagi terciptanya kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Pendekatan ini menegaskan bahwa kesejahteraan tidak dapat direduksi menjadi sekadar peningkatan pendapatan atau konsumsi. Kesejahteraan merupakan proses yang melibatkan peningkatan kapasitas produktif, stabilitas pendapatan, serta perlindungan terhadap risiko ekonomi. Dalam konteks ini, kebijakan publik harus dirancang untuk memperkuat keterkaitan antara produksi dan kesejahteraan, sehingga peningkatan output ekonomi benar-benar diterjemahkan menjadi perbaikan kondisi hidup masyarakat. Dengan demikian, kesejahteraan dipahami sebagai hasil kumulatif dari kebijakan yang konsisten, pasar yang berfungsi dengan baik, dan masyarakat yang berdaya.

Kerangka pemikiran ini memberikan landasan konseptual yang kuat bagi analisis kesejahteraan dalam sektor-sektor rentan seperti perikanan tangkap. Kesejahteraan nelayan tidak dapat dipahami hanya melalui kinerja pasar hasil tangkapan, tetapi harus dilihat dalam konteks kebijakan fiskal, struktur pasar, dan kapasitas kelembagaan. Dengan memadukan peran pasar minimal, intervensi negara yang terukur, dan dukungan komunitas, sistem kesejahteraan yang lebih adil dan berkelanjutan dapat diwujudkan. Pendekatan ini menempatkan kesejahteraan sebagai tujuan akhir pembangunan, sekaligus sebagai proses yang terus-menerus dibentuk oleh interaksi kebijakan dan dinamika ekonomi.

2.1.2 Teori Produksi

Produksi merupakan salah satu konsep inti dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan bagaimana proses transformasi berbagai input seperti modal, tenaga kerja, dan bahan baku menjadi output berupa barang dan jasa yang memiliki nilai

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ekonomi mikro, dipandang sebagai hubungan fungsional antara input dan output, di mana



efisiensi dalam pengelolaan faktor produksi menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu entitas ekonomi (Mankiw, 2006).

Secara teoritis, konsep produksi dijelaskan melalui kerangka fungsi produksi yang merepresentasikan proses teknis di mana sejumlah input tertentu digunakan untuk menghasilkan sejumlah output tertentu. Fungsi produksi ini menjadi dasar analisis dalam ekonomi neoklasik yang menekankan prinsip efisiensi marginal dan substitusi antar faktor produksi (Varian, 2014). Produksi juga dipahami sebagai *flow concept*, yaitu kegiatan ekonomi yang berlangsung secara terus-menerus dan diukur berdasarkan volume output dalam periode waktu tertentu, dengan asumsi kualitas output tetap stabil.

Menurut Samuelson and Nordhaus (2009), produksi tidak hanya berkaitan dengan penciptaan barang dan jasa, tetapi juga melibatkan penambahan nilai guna melalui proses transformasi sumber daya. Artinya, proses produksi tidak selalu menghasilkan barang baru, tetapi dapat meningkatkan kegunaan suatu barang dari segi bentuk, tempat, waktu, dan kepemilikan. Pandangan ini memperluas pemahaman bahwa produksi juga mencakup jasa dan aktivitas ekonomi non-fisik, seperti digital services atau platform ekonomi berbasis pengetahuan.

Dalam proses produksi, terdapat beberapa faktor utama yang saling berinteraksi dan menentukan efisiensi output. Pertama, *modal* merupakan alat utama produksi yang mencakup mesin, peralatan, teknologi, dan dana investasi. Modal memungkinkan terciptanya skala ekonomi dan peningkatan efisiensi proses. Kedua, tenaga kerja, yang menurut Murti (2019), adalah individu yang menawarkan keterampilan dan waktu untuk mendukung proses produksi, serta



oleh kompensasi dalam bentuk upah atau gaji berdasarkan atas kemampuannya. Ketiga, bahan baku merupakan input dasar yang diperlukan

dalam tahap awal produksi. Ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan mudah diakses sangat menentukan kontinuitas dan hasil akhir dari proses produksi.

Di sisi lain, perkembangan teori ekonomi kontemporer memberikan perhatian khusus pada faktor-faktor produksi non-konvensional seperti modal manusia dan teknologi. Menurut teori pertumbuhan endogen yang dikemukakan oleh Romer (1990) dan Lucas (1988), produktivitas tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah input fisik, tetapi juga oleh akumulasi pengetahuan, inovasi, dan kualitas sumber daya manusia. Dalam pendekatan ini, investasi pada pendidikan, pelatihan, dan riset menjadi bagian integral dari proses produksi yang berorientasi jangka panjang dan berkelanjutan. Penelitian oleh Aghion dan Howitt (2009) juga menunjukkan bahwa inovasi teknologi mendorong pergeseran fungsi produksi secara dinamis, menciptakan pertumbuhan ekonomi berbasis peningkatan produktivitas total (*total factor productivity*).

Temuan-temuan empiris mendukung pentingnya efisiensi produksi dalam meningkatkan output sektor riil. Studi oleh (Hossain *et al.*, 2020) menunjukkan bahwa efisiensi teknis dan alokasi faktor produksi yang tepat secara signifikan meningkatkan produktivitas pada sektor manufaktur di negara berkembang. Demikian pula, analisis oleh Beladi dan Oladi (2016) menegaskan bahwa struktur produksi yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan dinamika pasar menjadi penentu utama daya saing ekonomi suatu negara.

Dalam kerangka kebijakan, pemahaman terhadap teori produksi sangat penting bagi perencanaan pembangunan ekonomi, terutama dalam konteks penguatan sektor riil, peningkatan nilai tambah komoditas, serta efisiensi alokasi sumber daya. Oleh karena itu, teori produksi tidak hanya berfungsi sebagai alat

teknis, tetapi juga sebagai dasar konseptual dalam perumusan kebijakan strategis dan industrialisasi nasional.



Teori produksi memberikan fondasi ilmiah yang kuat dalam memahami bagaimana sumber daya dapat dikelola secara optimal untuk menciptakan output yang bernilai guna tinggi, meningkatkan efisiensi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sebagai salah satu konsep inti dalam ilmu ekonomi, proses penciptaan output melalui pemanfaatan berbagai input memiliki peran strategis dalam menjelaskan dinamika kegiatan ekonomi. Proses ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menjadi mekanisme utama yang menjembatani kebijakan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat. Melalui aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah, berbagai intervensi kebijakan baik fiskal, moneter, maupun kelembagaan diterjemahkan ke dalam peningkatan pendapatan dan daya beli pelaku ekonomi.

Dari sisi distribusi, peningkatan output tidak selalu berimplikasi langsung pada perbaikan kesejahteraan apabila hasil yang dihasilkan tidak terdistribusi secara merata. Kondisi tersebut menegaskan bahwa persoalan kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan besaran output, tetapi juga dengan struktur kepemilikan faktor produksi dan mekanisme pembagian nilai tambah. Pada sektor-sektor yang didominasi oleh pelaku usaha kecil dan menengah, termasuk sektor berbasis sumber daya alam, keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar sering kali menyebabkan manfaat ekonomi terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Dalam perspektif kelembagaan, proses penciptaan output dapat dipahami sebagai fenomena sosial-ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik dan struktur institusi yang mengaturnya. Akses pembiayaan, subsidi input, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi faktor-faktor kunci yang berpengaruh signifikan dalam membentuk efisiensi dan skala kegiatan ekonomi. Ketika kebijakan yang tepat mampu menurunkan biaya dan meningkatkan produktivitas, aktivitas



ekonomi menjadi lebih inklusif dan berpotensi memberikan dampak kesejahteraan yang lebih luas.

Konsep produktivitas kemudian muncul sebagai indikator penting yang mencerminkan kemampuan suatu sistem ekonomi dalam menghasilkan output maksimum dari input yang tersedia. Tingkat produktivitas yang tinggi menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi berjalan secara efisien, baik dari sisi teknis maupun alokatif. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas dipandang sebagai prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, karena ketergantungan pada penambahan input semata akan menghadapi keterbatasan sumber daya dalam jangka panjang.

Selain efisiensi, dinamika teknologi dan perubahan preferensi pasar turut membentuk karakter kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Aktivitas ekonomi yang adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal cenderung memiliki daya saing dan keberlanjutan yang lebih baik. Adaptasi tersebut dapat tercermin dalam perubahan metode kerja, pemanfaatan teknologi yang lebih efisien, serta diversifikasi output untuk menyesuaikan diri dengan permintaan pasar yang berkembang.

Dalam kerangka kebijakan ekonomi, jalur produksi berfungsi sebagai saluran utama transmisi kebijakan menuju peningkatan kesejahteraan. Kebijakan yang dirancang untuk memperluas akses terhadap faktor produksi, menekan biaya operasional, dan meningkatkan kapasitas produktif pada dasarnya bekerja melalui mekanisme ini. Melalui saluran tersebut, intervensi kebijakan dapat mendorong peningkatan pendapatan dan memperkuat daya beli masyarakat.

Meskipun demikian, keterkaitan antara peningkatan output dan kesejahteraan tidak bersifat otomatis. Tanpa dukungan mekanisme distribusi yang pasar yang berfungsi secara efisien, peningkatan output justru berpotensi memperbesar ketimpangan. Dalam kondisi pasar yang tidak sempurna, pelaku



ekonomi kecil sering kali berada pada posisi tawar yang lemah sehingga tidak sepenuhnya menikmati manfaat dari peningkatan aktivitas ekonomi.

Aspek stabilitas juga menjadi bagian penting dalam pembahasan ini. Sistem ekonomi yang rentan terhadap guncangan eksternal, seperti fluktuasi harga input atau perubahan permintaan, cenderung menghasilkan pendapatan yang tidak stabil. Ketidakpastian tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan pelaku ekonomi, terutama kelompok berpendapatan rendah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas ekonomi perlu diarahkan pada peningkatan ketahanan terhadap risiko, bukan semata-mata pada peningkatan volume output.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, penciptaan nilai tambah menempati posisi sentral sebagai sumber utama peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Semakin besar nilai tambah yang dihasilkan melalui proses ekonomi, semakin besar pula potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, strategi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan perlu menempatkan peningkatan nilai tambah sebagai prioritas kebijakan.

Implikasi lain dari kegiatan ekonomi berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja. Aktivitas yang bersifat padat karya mampu memperluas kesempatan kerja, sementara pendekatan berbasis teknologi meningkatkan produktivitas dan pendapatan tenaga kerja. Keseimbangan antara efisiensi dan penciptaan lapangan kerja menjadi faktor kunci dalam merancang kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang.

Secara konseptual, teori produksi memberikan landasan untuk memahami bagaimana kebijakan ekonomi memengaruhi kesejahteraan melalui jalur tidak langsung. Jalur ini memungkinkan penelusuran mekanisme di mana intervensi

- | berdampak pada peningkatan kapasitas ekonomi sebelum akhirnya
- | dalam perbaikan kesejahteraan.



Pendekatan tersebut membuka ruang evaluasi kebijakan yang lebih komprehensif. Kebijakan yang berorientasi pada penguatan kapasitas ekonomi cenderung memiliki dampak jangka panjang yang lebih berkelanjutan dibandingkan kebijakan yang hanya berfokus pada distribusi langsung. Dengan demikian, proses penciptaan output dan nilai tambah ditempatkan sebagai fondasi struktural dalam upaya peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.

2.1.3 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam sektor perikanan mencakup serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang sengaja diambil untuk mengelola sumber daya laut, memastikan ketahanan pangan, dan mendukung mata pencarian masyarakat nelayan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lasswell (1956), mendefinisikan kebijakan publik sebagai proses politik yang menjawab pertanyaan “*who gets what, when, and how*”, yang menekankan dimensi distribusi kekuasaan dan sumber daya dalam pengambilan keputusan publik.

Sementara itu, Dye (2013) memandang kebijakan publik sebagai serangkaian proses yang mencakup identifikasi masalah, perumusan kebijakan, implementasi regulasi, serta evaluasi dampak kebijakan. Dalam konteks sektor perikanan, proses tersebut mencakup penanganan isu penangkapan ikan berlebihan, penyusunan rencana pengelolaan berkelanjutan, pelaksanaan peraturan, dan penilaian efektivitas kebijakan. Salamon lebih lanjut menyoroti bahwa kebijakan ini menggunakan berbagai instrumen seperti kuota penangkapan, pembatasan alat tangkap, atau penetapan area perlindungan untuk memodifikasi perilaku penangkapan ikan dan mencapai hasil yang diinginkan, emulihan stok ikan atau distribusi sumber daya yang adil (Salamon,



Dalam dinamika sosial-politik sektor perikanan, kebijakan tidak cukup hanya berorientasi pada cita-cita normatif, tetapi harus bersifat pragmatis dan responsif. Ini berarti kebijakan perlu beradaptasi dengan lingkungan laut yang terus berubah, permintaan pasar, dan dinamika sosial masyarakat nelayan. Seperti yang disarankan oleh Schneider dan Ingram kebijakan yang efektif harus cukup fleksibel untuk memberikan solusi yang efektif dan aplikatif di lapangan. Misalnya, kebijakan yang mengatur tangkapan sampingan mungkin perlu disesuaikan seiring dengan evolusi teknologi penangkapan ikan atau munculnya data ilmiah baru mengenai spesies yang rentan (Schneider, A., & Ingram, H, 1990)

Kerangka kebijakan yang adaptif ini sering kali menggunakan berbagai teori tentang peran pemerintah dalam kebijakan publik, terutama subsidi dan transfer antar-pemerintah, untuk membentuk sektor perikanan. Subsidi perikanan, misalnya, dapat berupa bantuan keuangan untuk bahan bakar, pembangunan kapal penangkap ikan, atau fasilitas pengolahan. Meskipun beberapa studi empirik sebelumnya telah mendukung hubungan positif kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan nelayan, namun masih ada studi lainnya bertentangan seperti (Sumaila *et al.*, 2010) bahwa dampak berbagai subsidi terhadap peningkatan stok ikan dan efisiensi ekonomi tidak terbukti.

Berbagai teori dan instrumen kebijakan publik seperti subsidi BBM ,KUR, DAK, serta pengaturan ketenagakerjaan yang relevan di sektor perikanan telah diimplementasikan sebagai upaya memperkuat kinerja sektor perikanan dan mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan. Namun, efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut masih menjadi perdebatan, terutama terkait dengan bagaimana pengaruhnya bekerja secara tidak langsung melalui peningkatan produksi.



skipun sejumlah studi telah mengkaji pengaruh satu per satu dari i tersebut, belum banyak kajian di Indonesia yang secara eksplisit kan hubungan antara kebijakan fiskal dan tenaga kerja terhadap

kesejahteraan nelayan melalui produksi perikanan sebagai variabel mediasi yang memediasi hubungan antara kebijakan fiskal dan tenaga kerja dengan kesejahteraan nelayan dengan pendekatan . Hal ini menunjukkan adanya ruang kajian yang krusial, mengingat pendekatan Two-Stage Least Squares (2SLS) mampu mengatasi bias endogenitas yang tidak tertangani dalam regresi satu persamaan (Wooldridge, 2010).

Ketiga dimensi tersebut akan saling memperkuat apabila diterapkan melalui tata kelola yang berbasis pada hak akses hak akses (*access rights*) serta partisipasi aktif para pemangku kepentingan. Dalam kerangka tersebut, instrumen kebijakan yang lazim digunakan meliputi insentif fiskal, regulasi konservasi, program pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal maupun nasional. Adapun instrumen kebijakan utama yang lazim digunakan dalam kerangka tersebut mencakup:

1. KUR

KUR merupakan program intervensi fiskal pemerintah Indonesia yang bertujuan memperluas akses pembiayaan produktif kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk rumah tangga nelayan. Skema ini dirancang untuk menjembatani ketimpangan akses modal usaha yang kerap dialami oleh kelompok nelayan kecil, yang secara struktural berada di luar jangkauan sistem keuangan formal akibat keterbatasan agunan dan risiko yang tinggi. Dalam kerangka kebijakan publik, program ini dapat dikaji melalui dua lensa teoritis utama: *Distributive Policy Theory* dan *Financial Access Theory*.

Secara konseptual, *Distributive Policy Theory* sebagaimana dikemukakan oleh Lowi (1972), mengacu pada kebijakan yang bertujuan untuk mendistribusikan atau sumber daya kepada kelompok-kelompok tertentu dalam kat tanpa menyebabkan kompetisi langsung atau konflik kepentingan ompok sosial lainnya. Kebijakan distributif bersifat afirmatif, menargetkan



kelompok rentan, dan sering kali diimplementasikan dalam bentuk subsidi, bantuan, atau insentif fiskal. KUR merupakan contoh nyata kebijakan distributif yang memberikan fasilitas kredit berbunga rendah kepada nelayan kecil sebagai bentuk alokasi sumber daya publik guna mendorong kemandirian ekonomi dan produksi.

Dalam konteks tersebut, kebijakan KUR juga sangat relevan dengan Teori Akses terhadap Keuangan yang menekankan pentingnya inklusi finansial sebagai prasyarat bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Teori ini menjelaskan bahwa keterbatasan akses keuangan dapat menyebabkan stagnasi produktivitas, marginalisasi ekonomi, dan rendahnya kesejahteraan masyarakat miskin. Dengan membuka akses terhadap pembiayaan formal melalui KUR, nelayan kecil memperoleh peluang untuk berinvestasi dalam alat tangkap yang lebih efisien, meningkatkan modal kerja, dan memperluas usaha mereka ke pasar yang lebih kompetitif.

Beck, Demirgüç-Kunt, dan Levine menyatakan bahwa akses keuangan yang memadai memiliki efek katalis terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, terutama di sektor informal dan agraris. Akses kredit memungkinkan pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan ekonomi rumah tangga. Dalam konteks ini, KUR tidak hanya berfungsi sebagai alat fiskal, melainkan juga sebagai mekanisme peningkatan kapabilitas ekonomi bagi nelayan skala kecil (Beck *et al.*, 2000)

Namun demikian, efektivitas kebijakan KUR sebagai kebijakan distributif dan instrumen akses keuangan tetap sangat tergantung pada desain implementasi, akurasi targetting, dan keberlanjutan pengaruhnya. Sebagaimana disampaikan



eider & Ingram, H dan Ingram, efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi kemampuannya untuk adaptif, kontekstual, dan dapat diterapkan dalam lapangan. Oleh karena itu, kebijakan semacam ini memerlukan

pendekatan evaluatif berbasis *outcome*, bukan hanya berdasarkan pada tingkat penyaluran pinjaman semata, melainkan juga terhadap peningkatan produksi dan kesejahteraan yang dihasilkan (Shneider & Ingram, H, 1990)

2. Subsidi BBM

Subsidi BBM bagi nelayan merupakan bentuk intervensi fiskal negara untuk mengurangi beban biaya operasional nelayan kecil dan menjaga daya saing sektor perikanan. Pemerintah menetapkan harga khusus solar bersubsidi yang ditujukan bagi kapal berukuran kecil, guna memastikan kelangsungan usaha tangkap nelayan tradisional di tengah fluktuasi harga energi global. Intervensi ini lazim dilakukan di berbagai negara berkembang sebagai instrumen stabilisasi ekonomi lokal, terutama di wilayah pesisir yang rentan secara ekonomi (FAO, 2016).

Dalam kerangka *Distributive Policy Theory* sebagaimana dikemukakan oleh Lowi (1979), subsidi BBM dapat dikategorikan sebagai kebijakan distributif yang bertujuan mendistribusikan manfaat fiskal secara langsung kepada kelompok tertentu tanpa menyebabkan pertentangan politik besar. Subsidi ini disalurkan melalui kuota BBM bersubsidi yang diatur oleh lembaga pemerintah dan BUMN distribusi energi, untuk memastikan nelayan kecil memiliki akses bahan bakar dengan harga yang dapat dijangkau. Kebijakan ini mencerminkan intervensi negara dalam mendukung kelompok ekonomi lemah, terutama di sektor informal seperti perikanan tradisional

Namun demikian, dari perspektif *Energy Subsidy Theory*, subsidi energi seperti BBM memiliki implikasi ganda. Di satu sisi, subsidi ini meningkatkan kapasitas produksi dan akses nelayan terhadap sumber daya ekonomi. Di sisi lain, subsidi energi berpotensi menimbulkan distorsi harga, *overfishing*, dan tungan fiskal jangka panjang (Coady, Parry, Le, & Shang, 2015). Hal ini kkan bahwa kebijakan subsidi memerlukan desain dan evaluasi yang hati-



hati agar tidak menimbulkan konsekuensi negatif yang lebih besar dari manfaat awalnya.

Terkla, D. G dalam teorinya tentang kegagalan pemerintah (*government failure theory*) menggarisbawahi bahwa subsidi publik seringkali gagal mencapai tujuannya karena informasi yang asimetris, birokrasi yang tidak responsif, serta peluang rent-seeking (Terkla D.G., 1996). Dalam konteks subsidi BBM untuk nelayan, berbagai studi menunjukkan adanya penyimpangan distribusi, seperti tidak meratanya akses nelayan terhadap BBM bersubsidi, serta dominasi kelompok tertentu dalam proses alokasi (Rauf & Wahyuni, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun subsidi dirancang sebagai alat pemerataan, praktik implementasinya bisa menciptakan ketidakadilan baru.

Penelitian empiris menguatkan dugaan bahwa subsidi BBM tidak selalu mencapai nelayan sasaran. Studi oleh Rauf dan Wahyuni (2020) menunjukkan bahwa hanya 62% nelayan kecil di Sulawesi Selatan yang mendapatkan akses reguler terhadap BBM bersubsidi. Sisanya harus membeli dengan harga pasar atau melalui saluran tidak resmi. Ketimpangan ini mengindikasikan adanya kegagalan kebijakan dalam hal targeting dan efektivitas distribusi, yang dapat mengurangi dampak positif kebijakan terhadap kesejahteraan nelayan secara keseluruhan.

3. DAK

DAK merupakan bentuk intervensi fiskal dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah guna mendukung pembangunan bidang-bidang prioritas nasional, termasuk sektor Kelautan dan Perikanan. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah dan mempercepat



an pembangunan. Dalam konteks sektor perikanan, DAK umumnya n untuk membiayai infrastruktur penunjang seperti pelabuhan perikanan,

Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta program pemberdayaan nelayan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

DAK dapat dikategorikan sebagai bagian dari *distributive policy*, yakni kebijakan publik yang mendistribusikan manfaat fiskal secara langsung kepada kelompok tertentu atau wilayah tertentu, tanpa menimbulkan pertentangan yang signifikan di antara kelompok lainnya (Lowi, 1979). Sebagai kebijakan fiskal yang bersifat kolektif, DAK tidak langsung menyentuh individu nelayan, melainkan melalui proyek-proyek pembangunan daerah yang ditujukan untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan nelayan. Namun efektivitasnya sangat tergantung pada kemampuan institusional daerah dalam merencanakan dan mengelola dana tersebut.

Dalam kerangka teori fiskal desentralisasi, DAK berperan sebagai instrumen untuk memperkuat otonomi fiskal daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Menurut Oates (1999), desentralisasi fiskal yang efektif harus didukung oleh kapasitas tata kelola dan akuntabilitas publik. Dalam kenyataannya, tidak semua pemerintah daerah memiliki kesiapan kelembagaan yang memadai untuk mengelola DAK secara optimal. Hal ini menimbulkan variasi dalam hasil implementasi antar daerah, termasuk dalam sektor perikanan.

Kurniawan dan Agustina (2021) menunjukkan bahwa realisasi DAK di sektor perikanan sering tidak tepat sasaran dan tidak berdampak langsung terhadap peningkatan hasil tangkap atau kesejahteraan nelayan. Sebagian proyek menggunakan dana DAK hanya untuk memenuhi serapan anggaran, tanpa memperhatikan kebutuhan riil masyarakat pesisir. Selain itu, kurangnya partisipasi

dalam perencanaan menyebabkan ketidaksesuaian antara program dan lokal. Temuan ini sejalan dengan argumen Mardiasmo dan Djati (2020),



yang menyebutkan bahwa keberhasilan program berbasis DAK sangat ditentukan oleh kolaborasi lintas aktor dan tata kelola yang adaptif.

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan DAK juga dapat dianalisis melalui *theory of government failure* sebagaimana dikemukakan oleh Terkla. Kegagalan pemerintah dapat terjadi akibat informasi yang tidak simetris, birokrasi yang kaku, dan kecenderungan politisasi anggaran. Dalam konteks DAK, kegagalan ini tampak pada lambatnya realisasi proyek, pengadaan yang tidak sesuai, serta tumpang tindih peran antar lembaga. Akibatnya, potensi DAK sebagai pengungkit kesejahteraan nelayan tidak tercapai secara optimal, bahkan bisa menimbulkan inefisiensi fiskal (Terkla, D. G., 1996)

4. Tenaga Kerja Nelayan

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam menentukan tingkat produktivitas dan kesejahteraan sektor perikanan. Nelayan sebagai tenaga kerja utama dalam subsektor ini umumnya bekerja dalam kondisi informal, bersifat musiman, dan minim perlindungan sosial. Sebagai tulang punggung produksi perikanan tangkap, kontribusi tenaga kerja terhadap output sektor ini tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang terlibat (Béné, 2006). Dalam konteks ini, analisis terhadap peran tenaga kerja perlu melibatkan pendekatan multidimensi yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan.

Secara konseptual, kontribusi tenaga kerja terhadap produktivitas dapat dijelaskan melalui *teori modal manusia (human capital theory)* yang dikembangkan oleh Becker (1964). Teori ini menyatakan bahwa peningkatan keterampilan, pendidikan, dan pengalaman kerja akan meningkatkan produktivitas

yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Dalam konteks nelayan, investasi pada pelatihan teknik penangkapan ikan, pengetahuan ekosistem laut, dan keselamatan kerja akan



memperkuat daya saing sektor ini secara berkelanjutan. Namun, keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan masih menjadi hambatan utama di banyak wilayah pesisir Indonesia.

Sektor perikanan di Indonesia sebagian besar masih berada dalam pasar tenaga kerja informal, dengan karakteristik hubungan kerja yang tidak tetap, tidak terikat kontrak, dan tanpa jaminan sosial. Teori dualisme pasar tenaga kerja (*dual labor market theory*) yang dikemukakan oleh Doeringer dan Piore (1971) menjelaskan adanya pemisahan antara pasar tenaga kerja formal dan informal, di mana pasar informal cenderung menampung tenaga kerja berpendidikan rendah dan kurang perlindungan. Hal ini menjelaskan mengapa produktivitas sektor perikanan seringkali rendah meskipun jumlah tenaga kerja tinggi.

Selain aspek individual dan struktural, dimensi kelembagaan juga berpengaruh besar terhadap kualitas tenaga kerja perikanan. Dalam perspektif *institutional theory*, peran norma, aturan formal, dan kelembagaan lokal menjadi krusial dalam membentuk perilaku ekonomi para nelayan (North, 1990). Ketika kelembagaan desa pesisir, koperasi nelayan, atau Kelompok Usaha Bersama berfungsi secara efektif, maka proses distribusi informasi, pelatihan, dan akses terhadap program pemerintah akan menjadi lebih efisien dan inklusif.

2.2 Kajian Empiris

2.2.1 Hubungan KUR Sektor Perikanan Tangkap terhadap Kesejahteraan Nelayan melalui Produksi Perikanan Tangkap di Indonesia

Nelayan pada subsektor perikanan tangkap menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan aktivitas usahanya, salah satu di antaranya adalah kurangnya akses terhadap sumber permodalan. Hambatan tersebut sering kali



muncul dalam bentuk kesulitan melakukan perawatan dan perbaikan kapal, pengadaan BBM, serta pemenuhan biaya tenaga kerja yang diperlukan dalam kegiatan operasional penangkapan ikan. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya kemampuan nelayan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha perikanan tangkap.

Penyaluran KUR oleh pemerintah merepresentasikan upaya strategis dalam memperkuat struktur permodalan nelayan guna meningkatkan daya saing sektor perikanan tangkap. Akses terhadap sumber pembiayaan formal ini tidak hanya memperkuat likuiditas usaha, tetapi juga berpotensi memperluas kapasitas produksi dan menstimulasi peningkatan pendapatan nelayan melalui efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi.

Kebijakan pemerintah meningkatkan subsidi perikanan dan peralatan perikanan berkontribusi menurunkan biaya operasional dan meningkatkan produksi perikanan (Hentrich & Salomon, 2006). Penelitian di Provinsi Hubei, Tiongkok, menunjukkan bahwa masyarakat nelayan yang semula menggantungkan sumber pendapatan dari aktivitas penangkapan ikan mengalami pergeseran pola ekonomi, di mana sebagian beralih ke sektor nonperikanan dengan dukungan program subsidi modal dari pemerintah setempat (Zhou *et al.*, 2022). Temuan serupa dikemukakan oleh, (Nguyen & Kinnucan, 2018) yang menjelaskan bahwa orientasi ekonomi nelayan sangat dipengaruhi oleh kestabilan pendapatan dan akses terhadap modal; namun demikian, peningkatan kapasitas produksi hanya dapat tercapai apabila nelayan memiliki peralatan produksi yang memadai. Sementara itu, studi klasik oleh Pollnac (1975) melalui model simulasi stokastik menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga ikan sebesar 0,25% dapat



meningkatkan pendapatan nelayan hingga 1%, yang pada gilirannya memberikan manfaat signifikan bagi produsen di kawasan pesisir bagian selatan Amerika (Richard B. Pollnac, 1975).

KUR memberikan kemudahan dalam mendapatkan modal usaha dengan bunga yang lebih rendah dan syarat yang lebih mudah dibandingkan kredit komersial. Dengan adanya KUR, nelayan dapat membeli peralatan tangkap ikan yang lebih modern, memperbaiki kapal, atau meningkatkan kapasitas produksi perikanan. Ini akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan.

Penelitian tentang dampak akses kredit terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan yang dilakukan oleh (Anggreni, *et al.*, 2020) menggunakan logit regression dengan menggunakan beberapa variabel independen dengan kategori 0-1 dan hasilnya bahwa nelayan yang menggunakan teknologi dalam bekerja lebih memudahkan mendapat kepercayaan akses kredit dari lembaga keuangan formal dan nonformal, begitu juga tingkat pendidikan yang dimiliki pemilik kapal (juragan nelayan) yang memiliki agunan (asset) signifikan berpengaruh untuk mendapatkan pinjaman.

Ika A. P meneliti mengenai penyaluran KUR kepada pelaku UMKM yang tidak memiliki akses ke perbankan (nonbankable). Penelitian ini menemukan bahwa subsidi bunga kredit dari bank berpotensi salah sasaran karena bank lebih mengutamakan nasabah yang memiliki agunan. Padahal, salah satu tujuan utama penyaluran KUR adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM. Hambatan tersebut membuat pelaku UMKM kesulitan mengakses fasilitas KUR secara optimal (Ika. A. P, 2024)

2.2.2 Hubungan Subsidi BBM Sektor Perikanan Tangkap terhadap kesejahteraan Nelayan melalui Produksi Perikanan tangkap di Indonesia.



tingkatan subsidi bahan bakar federal dan negara bagian memberikan an peningkatan kontribusi pada kelebihan armada perkapalan dan

eksploitasi sumber daya perikanan berlebihan tetapi pendanaan yang ambigu berdampak pada peningkatan hasil produksi perikanan di Wilayah bagian di Amerika.(Sharp & Sumaila, 2009).

Strategi subsidi perikanan langsung mempunyai hasil sulit diprediksi, karena subsidi perikanan global memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan di 33 negara untuk hal tersebut diperlukan pemberian subsidi berbeda pada setiap negara (Cisneros-Montemayor *et al.*, 2016) Bantuan pemerintah meningkatkan kesejahteraan nelayan, yang terlihat dari perubahan tingkat pendapatan yang lebih besar. (Firdaus, M., & Hartono., 2020).

Subsidi solar di wilayah Bitung terbukti meningkatkan keuntungan nelayan karena penurunan biaya operasional secara signifikan. Namun, pada beberapa pelabuhan lain, subsidi solar justru menunjukkan pengaruh negatif terhadap pendapatan nelayan, yang mengindikasikan adanya perbedaan efektivitas kebijakan antarwilayah. (Luhur dan Sari, 2017). Sementara jurnal *Effect of Fisheries Subsidies Negotiations on Fish Production and Interest Rate* menganalisis pengaruh negosiasi subsidi perikanan terhadap pasar keuangan dan agregat permintaan di negara maju dan berkembang. Kami memeriksa skenario yang masuk akal yang mungkin terjadi muncul jika terjadi penghapusan atau pengurangan subsidi, dan dampak selanjutnya terhadap keuangan pasar dan produksi ikan. Kami menggunakan kerangka statis makroekonomi Keynesian, yaitu berdasarkan pada tabungan investasi (IS) dan preferensi likuiditas – jumlah uang beredar (LM) model untuk analisis.

Analisis kami menunjukkan dampak pengurangan subsidi perikanan akan mengurangi eksploitasi sumber daya ikan dan kelautan di negara-negara ang, sehingga mengarah pada kenaikan umum harga ikan dan stabilisasi pada tingkat yang lebih rendah. Kami juga menemukan bahwa kondisi turut memengaruhi pasar keuangan, yang pada akhirnya menurunkan



suku bunga di negara-negara berkembang pengekspor ikan ke negara maju. namun tingkat suku bunga cenderung stabil pada tingkat yang lebih tinggi di negara-negara maju yang mengimpor ikan (Kumar *et al.*, 2020).

Pengurangan biaya operasional terjadi ketika ada subsidi dan hal ini memberi keuntungan kepada nelayan dari sisi peningkatan pendapatan (Ali *et al.*, 2017). Penggunaan alat tangkap sederhana dan alat angkut kecil terpengaruh oleh hasil produksi perikanan mengakibatkan rendahnya pendapatan nelayan. (Sujarwo *et al.*, 2022) Subsidi perikanan penganggaran negara tetapi diperlukan dinegara berkembang. Subsidi tersebut memberikan dampak positif terhadap perikanan.(Wicaksono, 2019)

Subsidi BBM membantu menekan biaya operasional mereka sehingga margin keuntungan dapat meningkat. Dengan subsidi BBM, nelayan dapat melakukan perjalanan yang lebih jauh untuk menangkap ikan tanpa harus khawatir akan tingginya biaya bahan bakar. Ini membantu nelayan tetap kompetitif dan meningkatkan pendapatan, yang dapat memperbaiki kualitas hidup nelayan dan seringkali distribusi subsidi BBM tidak merata atau sulit diakses oleh semua nelayan, yang bisa menjadi hambatan bagi kelompok nelayan kecil.

Penelitian Abimanyu (2023) membahas hubungan antara subsidi BBM terhadap kesejahteraan nelayan. Dengan menggunakan Analisis Miyazawa, hasil penelitian menunjukkan bahwa subsidi BBM cenderung dinikmati tidak hanya oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga oleh kelompok menengah ke atas. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan subsidi BBM dan LPG bersifat politis dan kurang tepat sasaran, sehingga memberikan pengaruh negatif terhadap pemerataan kesejahteraan



Penelitian oleh (Nwachukwu and Chike, 2011) menganalisis pro dan kontra kebijakan subsidi BBM di Nigeria. Meskipun hipotesis awal menyatakan subsidi BBM tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan, hasil

analisis regresi menunjukkan sebaliknya, yakni bahwa subsidi BBM memberikan pengaruh signifikan. Hal ini membuktikan bahwa subsidi tersebut memberikan dampak nyata, dan tidak dapat dianggap sebagai kebijakan yang keliru. Hasil Penelitian (Ali *et al.*, 2017) meneliti berbagai bentuk subsidi perikanan yang telah diberikan kepada nelayan di Malaysia, manfaat yang diperoleh dari subsidi tersebut, serta pandangan masyarakat terhadap arah kebijakan subsidi perikanan di masa mendatang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subsidi dapat menurunkan biaya operasional penangkapan ikan dan meningkatkan pendapatan nelayan, sehingga meningkatkan profitabilitas usaha perikanan. Namun, kapitalisasi yang berlebihan dan kapasitas penangkapan ikan yang melebihi batas berkontribusi terhadap eksploitasi sumber daya perikanan secara berlebihan.

Lebih lanjut, penelitian tersebut mengungkap bahwa tunjangan subsidi dinilai kurang efektif dalam meningkatkan keberlanjutan mata pencaharian nelayan, karena justru memperkuat ketergantungan terhadap subsidi. Penghentian subsidi tidak secara signifikan memengaruhi mata pencaharian nelayan, meskipun baik nelayan pemilik perahu tipe A maupun tipe B tetap menganggap tunjangan bulanan sebagai hal yang penting, terutama dalam menghadapi situasi krisis. Secara khusus, subsidi bahan bakar dinilai sebagai komponen paling vital karena secara langsung mengurangi biaya operasional penangkapan ikan. Oleh karena itu, subsidi BBM memiliki implikasi penting terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan. Mengingat sebagian besar rumah tangga nelayan sangat bergantung pada hasil tangkapan untuk memenuhi kebutuhan hidup, pemerintah perlu menerapkan kebijakan pengelolaan perikanan yang efektif guna mengurangi tekanan eksploitasi terhadap sumber daya laut.



2.2.3 Hubungan DAK Sektor Perikanan Tangkap terhadap kesejahteraan Nelayan melalui Produksi Perikanan tangkap di Indonesia

Kungwan Juntarashote melakukan analisis terhadap rendahnya pendapatan nelayan di teluk Phang-nga karena menggunakan peralatan sederhana sebagai tindak lanjut perlunya pemerintah Thailand melakukan pembangunan infrastruktur sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan di Phang-nga Thailand (Kungwan Juntarashote, 1998). Sementara itu, dalam penelitian Rafy dan Aziz Muthalib, analisis regresi terhadap variabel model pemberdayaan, produktivitas, dan kesejahteraan nelayan menunjukkan bahwa model pemberdayaan yang direpresentasikan melalui indikator indikator DAK berpengaruh positif terhadap produktivitas. Selanjutnya, peningkatan produktivitas tersebut terbukti berdampak positif terhadap pendapatan nelayan (Rafi'i & Aziz Muthalib, 2015).

Lago Venas dan Martinez Varques dengan judul *On the Effects of Intergovernmental Grants: A Survey* menemukan bahwa tinjauan komprehensif dan terkini mengenai dampak kebijakan hibah antar pemerintah dan pilihan pajak, pengeluaran keputusan, stabilitas fiskal dan pilihan perilaku, dan ekonomi politik berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. (Lago *et al.*, 2022)

Hasil simulasi menunjukkan peningkatan DAK pertanian dan irigasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan areal sawah irigasi, produksi dan ketahanan pangan daerah peningkatan areal sawah irigasi, produksi dan ketahanan pangan daerah simulasi menunjukkan peningkatan DAK (pertanian dan irigasi) memberikan dampak positif terhadap peningkatan areal sawah irigasi, produksi dan ketahanan pangan daerah simulasi menunjukkan peningkatan

in, 2021).



Penggunaan dana alokasi yang tepat dapat meningkatkan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung kegiatan nelayan, seperti tempat penyimpanan yang memadai dan peningkatan kapasitas teknologi tangkap. Dana ini bisa digunakan untuk infrastruktur pelabuhan, fasilitas pelelangan ikan, perbaikan alat tangkap, dan pelatihan bagi nelayan. Hal ini akan meningkatkan hasil tangkapan dan nilai jual ikan, sehingga berimbas pada kesejahteraan nelayan. Pemanfaatan dana yang transparan dan efisien sangat penting untuk memastikan bahwa dampak positifnya dapat dirasakan langsung oleh nelayan.

2.2.4 Hubungan Tenaga Kerja sektor Perikanan Tangkap terhadap Kesejahteraan Nelayan melalui Produksi Perikanan Tangkap di Indonesia

Tenaga kerja pada perikanan tradisional umumnya berasal dari keluarga nelayan yang mewarisi keahlian antar-generasi, dan keberadaannya sangat penting untuk mendukung proses penangkapan, pengelolaan kapal, serta pengolahan hasil tangkapan. Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan jumlah yang cukup akan mendukung efisiensi operasional. Namun, jika tenaga kerja tidak terampil atau berkurang karena migrasi ke sektor lain, produktivitas nelayan dapat menurun. Selain itu, upaya peningkatan keahlian (skill development) melalui pelatihan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan, sehingga berdampak positif pada kesejahteraan mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh (Lee and Lee, 2024) mengkaji pengaruh kondisi tenaga kerja terhadap tingkat kesejahteraan nelayan di Korea. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peningkatan kebijakan



kerjaan yang berkaitan dengan kelelahan kerja dan kesejahteraan. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini menekankan pada pemberian kompensasi serta perlindungan hak-hak buruh nelayan,

agar kondisi kerja mereka sejajar dengan standar ketenagakerjaan internasional yang ditetapkan oleh International Labour Organization (ILO).

Fokus perlindungan ini terutama diarahkan kepada nelayan skala kecil yang berperan penting dalam pengembangan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Tenaga kerja di sektor perikanan terdiri dari keluarga nelayan itu sendiri dengan keahlian yang diwariskan secara turun temurun. Sektor perikanan, terutama pada skala tradisional, membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang memadai untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan, mengelola kapal, serta mengolah hasil tangkapan pasca panen.

Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan proporsional akan mendukung efisiensi operasional dan menjaga stabilitas produksi. Sebaliknya, penurunan jumlah tenaga kerja akibat migrasi ke sektor lain, atau rendahnya keterampilan kerja, dapat menurunkan produktivitas nelayan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi (skill development) melalui pelatihan teknis dan manajerial menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan nelayan.

Selaras dengan temuan tersebut, (Béné *et al.*, 2016) dalam penelitiannya di kawasan Asia-Pasifik menemukan bahwa peningkatan keterampilan tenaga kerja nelayan melalui pendidikan vokasional dan pelatihan berbasis teknologi dapat meningkatkan efisiensi penangkapan serta nilai ekonomi hasil tangkapan. Studi tersebut menyoroti bahwa tenaga kerja nelayan yang memiliki kemampuan teknis dalam pengelolaan sumber daya laut cenderung lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan dinamika pasar, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan rumah tangga nelayan dan memperkuat ketahanan ekonomi pesisir.



Penelitian lain oleh (Islam *et al.*, 2021) di Bangladesh juga menunjukkan peningkatan produktivitas tenaga kerja berhubungan positif dengan tingkat pendidikan nelayan. Melalui analisis regresi panel, mereka menemukan bahwa

pelatihan teknis, pengalaman kerja, serta dukungan kelembagaan memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja dan pendapatan nelayan skala kecil.

Di Indonesia, Syahroni dan Kusnadi mengungkapkan bahwa faktor tenaga kerja memiliki pengaruh nyata terhadap pendapatan dan kesejahteraan nelayan di beberapa wilayah pesisir Jawa Timur. Tenaga kerja yang memiliki pengalaman panjang dan keahlian teknis lebih efisien dalam mengoperasikan kapal dan alat tangkap, sehingga mampu menekan biaya operasional dan meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan (Syahroni & Kusnadi, 2022)

Namun demikian, penelitian tersebut juga menyoroti adanya kesenjangan keterampilan antara generasi tua dan muda, yang dapat menghambat transfer pengetahuan dan regenerasi tenaga kerja di sektor perikanan. Sejalan dengan itu, Puspitasari D., menegaskan bahwa investasi dalam pelatihan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia nelayan memiliki korelasi langsung dengan peningkatan produktivitas, diversifikasi usaha, dan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat pesisir (Puspitasari D, 2018)

2.2.5 Hubungan Produksi Perikanan Tangkap Terhadap Kesejahteraan Nelayan di Indonesia

Peningkatan produksi perikanan tangkap memiliki peranan penting dalam memperkuat kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir. Secara ekonomi, peningkatan hasil tangkapan baik dari segi volume maupun nilai komersial memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan nelayan.

Produksi yang meningkat menciptakan efisiensi biaya operasional melalui efek ekonomi serta membuka peluang bagi nelayan untuk memperluas jaringan dan meningkatkan daya saing di pasar.



Selain itu, optimalisasi rantai pasok dan tata niaga hasil tangkapan juga memperkuat posisi nelayan sebagai pelaku ekonomi yang produktif. Dalam konteks kesejahteraan, peningkatan pendapatan dari hasil produksi memungkinkan nelayan untuk memenuhi kebutuhan dasar, memperbaiki kualitas hidup keluarga, serta meningkatkan akses terhadap layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Hasil-hasil penelitian internasional menunjukkan bahwa peningkatan produksi perikanan secara konsisten berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan rumah tangga nelayan. Allison and Ellis menegaskan bahwa pertumbuhan produktivitas sektor perikanan mampu meningkatkan pendapatan dan mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat pesisir apabila diikuti oleh sistem kelembagaan dan mekanisme pasar yang efisien (Allison and Ellis, 2001). Béné and Friend juga menemukan bahwa kesejahteraan nelayan meningkat secara signifikan ketika produksi dikaitkan dengan akses pasar dan distribusi keuntungan yang lebih adil (Béné and Friend, 2019).

Sementara itu, Hanich melalui studi ekonometrika di wilayah Pasifik Selatan menunjukkan bahwa setiap peningkatan volume tangkapan sebesar 10 persen mampu menaikkan rata-rata pendapatan nelayan hingga 3,7 persen. Secara umum, bukti empiris tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan produksi tidak hanya berdampak pada keseimbangan ekonomi individu nelayan, tetapi juga memperkuat daya tahan ekonomi lokal terhadap gejolak harga dan sumber daya (Hanich *et al.*, 2018).

Kajian lain menyoroti bahwa peningkatan produksi tidak serta-merta menjamin peningkatan kesejahteraan nelayan apabila tidak disertai penguatan kelembagaan dan integrasi dalam rantai nilai. (Fabinyi *et al.*, 2017) kan bahwa peningkatan volume produksi perlu diimbangi dengan an aktif nelayan dalam rantai nilai (value chain integration) agar mereka



tidak hanya berperan sebagai produsen primer, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi dari proses pengolahan dan pemasaran.

Penelitian (Hapsari *et al.*, 2020) di Indonesia bagian timur juga mengonfirmasi bahwa hubungan antara produktivitas dan kesejahteraan nelayan bersifat positif, meskipun dampaknya sangat bergantung pada efektivitas distribusi hasil tangkapan dan stabilitas harga ikan di tingkat lokal. Peningkatan produksi harus dibarengi dengan tata kelola pasar dan kelembagaan yang adaptif untuk memastikan distribusi manfaat yang merata bagi seluruh pelaku perikanan.

Penelitian di Indonesia memperlihatkan konsistensi dengan temuan global. Yudha dan Purbadharmaja (2019) menunjukkan bahwa peningkatan produksi perikanan berkontribusi terhadap perluasan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui efek ganda (*multiplier effect*) pada sektor ekonomi kreatif berbasis perikanan. Hasil serupa dikemukakan oleh Damora, Rahmawati, dan Pratomo (2022) yang menemukan bahwa efisiensi teknis produksi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan nelayan. Mereka menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan akan tercapai apabila peningkatan produksi disertai dengan peningkatan produktivitas, penerapan teknologi tepat guna, dan dukungan kebijakan fiskal yang memadai.

Oleh karena itu, dalam kerangka pembangunan ekonomi kelautan, peningkatan produksi perikanan tangkap bukan hanya indikator keberhasilan ekonomi, tetapi juga instrumen penting dalam memperkuat dimensi sosial, kelembagaan, dan kesejahteraan masyarakat nelayan secara berkelanjutan.





Optimized using
trial version
www.balesio.com